



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

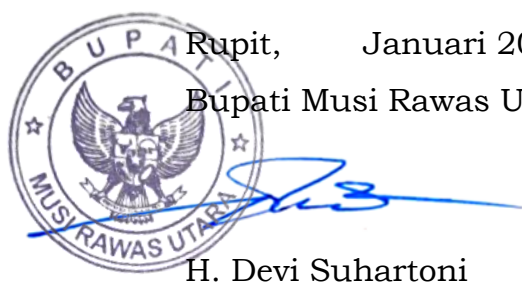
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 merupakan laporan capaian Tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 yang berisi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, selain itu memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil maupun manfaat yang diterima masyarakat. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan supaya lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rupit, Januari 2024
Bupati Musi Rawas Utara



H. Devi Suhartoni

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang undang 23 tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Daerah wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada Pemerintah, DPRD dan Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini selain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan serta sebagai wujud transparansi atau keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah:

1. Untuk bahan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023.
2. Untuk alat ukur pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
3. Untuk bahan evaluasi pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
4. Untuk alat kendali / *controlling* bagi Kepala Daerah untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
5. Untuk bahan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

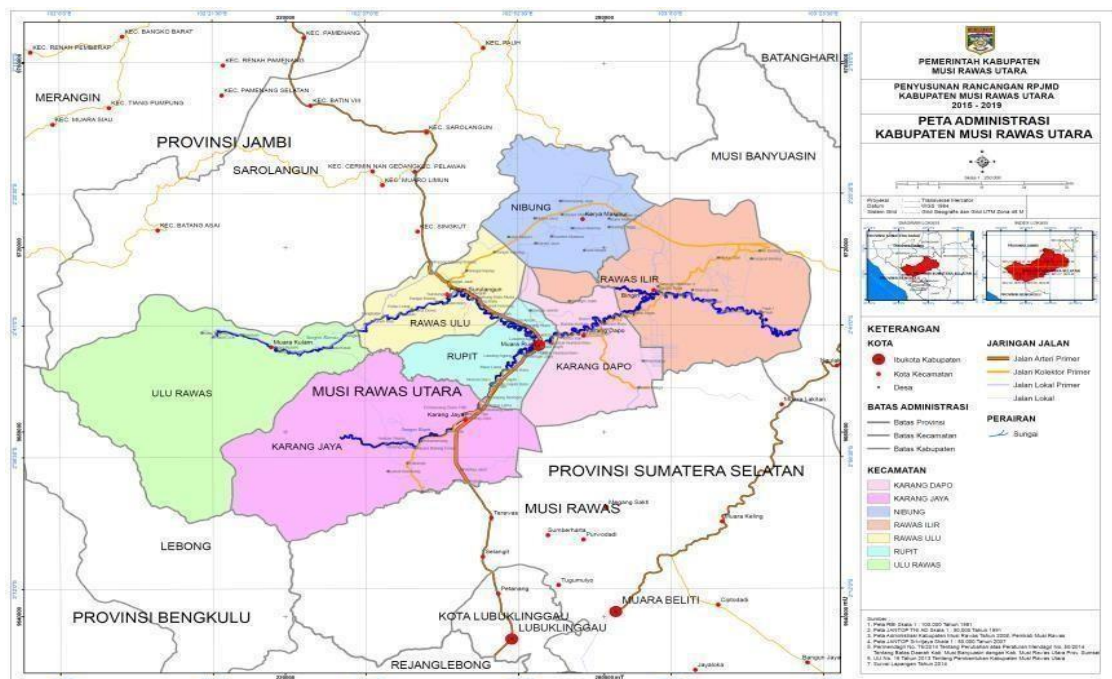
Laporan Kinerja disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan serta target yang diperjanjikan dan ditetapkan setiap Perangkat Daerah. Sebagai alat pendorong terwujudnya good governance dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

c. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari 7 wilayah kecamatan, 7 Kelurahan dan 89 desa. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 102°40" BT – 103°22'13"BT dan 2°19'15" LS – 3°6'30" LS, dengan luas wilayah mencapai 6.008,55 km². Dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin, sebelah selatan dengan Kabupaten Musi Rawas dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Gambar 1.



Peta Kabupaten Musi

Kabupaten Musi Rawas Utara beribukota di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dengan luas wilayah

mencapai 6.008,55 km². Secara administratif, Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi tujuh kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Ulu Rawas yang mencapai hampir seperempat luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara. Kecamatan Rupit merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 6,41% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

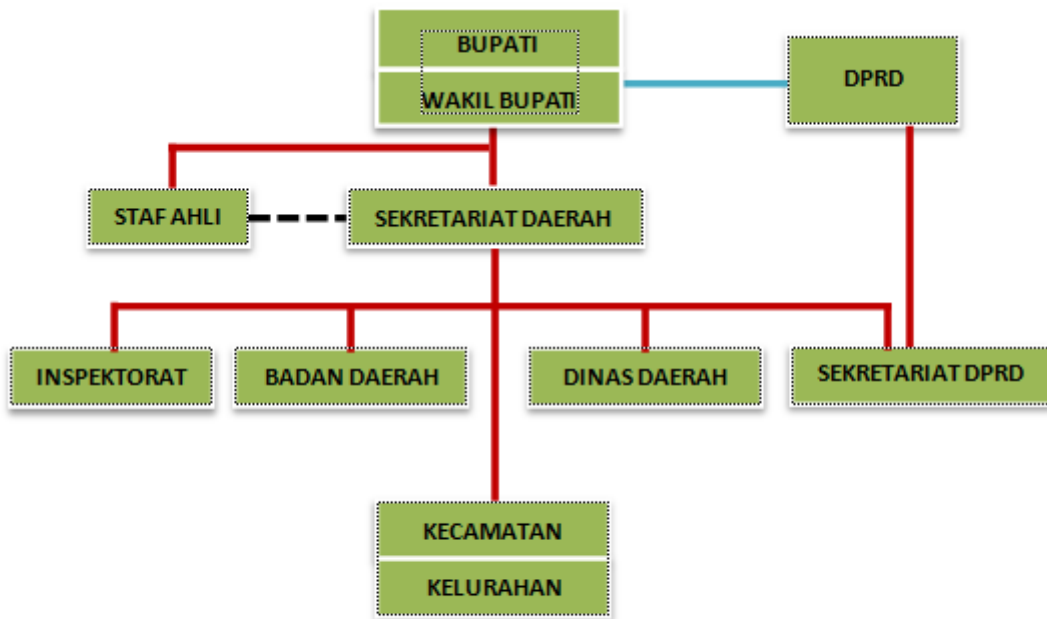
2. Topografis

Hasil analisis peta topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai >40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini setidaknya mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 m dpal. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian.

D. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan perangkat daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdiri dari :



Keterangan Garis:

- Garis Hubungan Kemitraan dan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD
- Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 terdiri dari 4 (Empat) BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan

tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional ; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah- langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kurun waktu tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan akan terwujud pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan

Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara 2021- 2026, berbagai keberhasilan dan permasalahan pembangunan periode 2021-2026 yang signifikan, isu-isu strategis dalam 5 tahun ke depan 2021-2026, sekaligus untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka diperlukan upaya untuk mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kabupaten Musi Rawas Utara yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan diarahkan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Kabupaten Musi Rawas Utara 2021-2026, yakni:

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah :
“MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH”

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut, maka perlunya menyusun strategi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun strategi-strateginya sebagai berikut:

1. Misi I : **Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata**, yaitu :
 - a. Meningkatkan potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah;
 - b. Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata;
 - c. Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar;

- e. Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang merata;
 - f. Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah;
 - g. Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
 - h. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih
 - i. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. Meningkatkan upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun sosial; dan
 - k. Meningkatkan pembangunan desa.
2. Misi II : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, toleran dan harmoni berdasarkan Pancasila**, yaitu:
- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau;
 - b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - c. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas penduduk;
 - d. Meningkatkan budaya literasi;
 - e. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - f. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan anak, perempuan dan masyarakat;
 - g. Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - h. Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi;
 - i. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat; dan
 - j. Mendorong penguatan pengetahuan, sikap dan praktek keagamaan masyarakat.

3. Misi III : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel,**

yaitu :

- a. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- c. Meningkatkan pemerintahan yang partisipatif dan responsif;
- d. Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas; dan
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi : “MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH”		
MISI 1. MENINGKATKAN DAYA SAING MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MERATA		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya potensi dan daya saing sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan Meningkatkan nilai tambah potensi pariwisata
	Meningkatnya investasi dan iklim usaha yang kompetitif	Meningkatkan kemudahan investasi dan keamanan
Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana prasarana permukiman dan perumahan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar
	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan	Meningkatkan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas wilayah

	dasar dan perekonomian daerah	yang merata
	Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana prasarana umum dan soSial	Meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan daerah irigasi sesuai potensi daerah
		Meningkatkan pengolahan daerah aliran sungai (DAS), konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem pengolahan air bersih
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya Upaya pengurangan risiko kebencanaan melalui upaya preventif dan mitigasi bencana	Meningkatnya upaya mengurangi resiko bencana melalui pencegahan dan penanganan bencana baik fisik maupun social
	Meningkatnya pembangunan utilitas pedesaan guna peningkatan status desa	Meningkatkan pembangunan desa

**MISI 2.
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERAKHLAK TOLERAN DAN HARMONI BERDASARKAN
PANCASILA**

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing melalui sektor pendidikan, kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan guna peningkatan daya saing pendidikan	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau
	Meningkatnya derajat kesehatan dengan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan

	peningkatan layanan kesehatan masyarakat	pelayanan kesehatan
	Meningkatnya tata kelola kependudukan dan terkendalinya pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas masyarakat
	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	Meningkatkan budaya literasi
	Menurunkan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha
	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat, perlindungan anak, kesetaraan gender dan pengurangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan anak, perempuan dan masyarakat
		Meningkatkan data, informasi dan perlindungan jaminan sosial
	Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi
Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib, agamis dan berbudaya	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat
	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat	Mendorong penguatan pengetahuan, sikap, dan praktek keagamaan masyarakat
MISI 3 “MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG CERDAS, INOVATIF, TRANSPARAN, RESPONSIF DAN AKUNTABEL”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Memperkuat Birokrasi yang berorientasi	Meningkatnya kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai asas-	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

kinerja, transparan, berintegritas dan berdaya saing	asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan masyarakat	pelayanan public
	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas pengelolaan kinerja dan keuangan daerah	Meningkatkan pemerintah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya level kematangan sistem pengawasan intern pemerintah, profesionalisme dan integritas aparatur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan pemerintah yang partisipatif dan responsif
	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan dan kualitas atas keputusan daerah	Meningkatkan kinerja birokrasi yang transparan dan berkualitas
	Meningkatnya kapabilitas perangkat daerah, pengelolaan kearsipan dan sistem pemerintah berbasis elektronik	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4 - 4,25
		Gini Rasio	0,260
2.	Meningkatkan pemerataan dan Layanan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	63,02
3.	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia	66
4.	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat tertib, agamis dan berbudaya	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	85
5.	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegrasi dan berdaya saing.	Indeks Reformasi Birokrasi	65
		Predikat EKPPD	3,25

Tabel 2.1
 Realisasi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
 Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4 - 4,25	4,34
		Gini Rasio	0,260	0,296
2.	Meningkatkan pemerataan dan Layanan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	63,02	
3.	Meningkatkan daya saing manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Pembangunan Manusia	66	69,63
4.	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat tertib, agamis dan berbudaya	Persentase potensi gangguan / konflik yang teratasi	85	
5.	Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, berintegrasi dan berdaya saing.	Indeks Reformasi Birokrasi	65	56,26
		Predikat EKPPD	3,25	2,12

BAB III

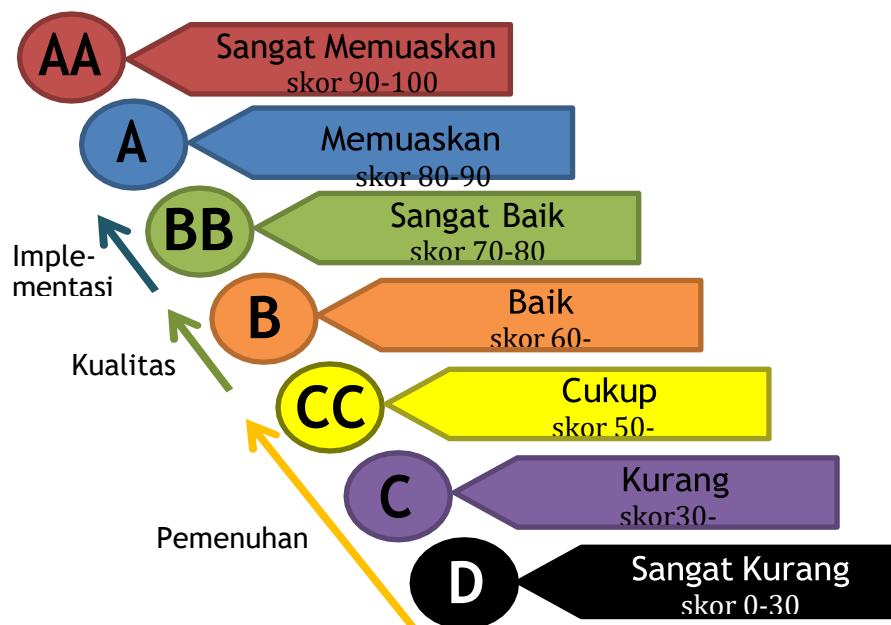
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 sampai dengan 2026. Perkembangan capaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun kedua adalah dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Sehubungan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tidak mengatur format pengukuran kinerja maka format Pengukuran Kinerja masih berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023.

Nilai hasil akhir evaluasi LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada skema

dibawah ini:



Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara ini dibagi menjadi 2 (dua) fokus pembahasan, yaitu pembahasan pencapaian IKU ditingkat tujuan serta pembahasan pencapaian indikator tambahan ditingkat sasaran. Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja (%) Tahun 2023	Target s.d 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4-4,25	4,34	102,11%	4,5-,75
2	Gini Rasio	Indeks	0,260	0,296	113,85%	0,256
3	Indeks Infrastruktur	Indeks	63,02		135,47%	67,34
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66	69,63	105,5%	68
5	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang Teratasi	Persen	85	0	100%	95
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	56,26	85,01%	72
7	Predikat EKPPD	Poin	3,25	2,12	65,23%	3,42

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

1. Misi 1 :

MENINGKATKAN DAYA SAING MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA ALAM BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEARIFAN LOKAL DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MERATA

a. Tujuan

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS SELAIN POTENSI SDM, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA MEMILIKI SUMBERDAYA ALAM YANG MELIMPAH

Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara Memiliki Karakteristik kondisi geografis yang mendukung pertanian, pertambangan dan pariwisata. di sektor perkebunan Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki perkebunan sawit, karet dan hortikultura, sedangkan dibidang wisata Kabupaten Musi Rawas Utara terbentuk secara alami sehingga menjadi potensi unggulan Kabupaten Musi Rawas Utara. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di Kabupaten Musi Rawas Utara harus dapat mewujudkan perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan kinerja ini di ukur dengan:

Tabel. 3.2

Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4-4,25	4,34	102,11%
Gini Rasio	0,260	0,296	113,85%

Sumber Data : BPS Tahun 2023

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari pengaruh infrastruktur yang ada dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Menurut hasil perhitungan dari badan pusat statistik, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan

$$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100$$

jasa dalam suatu wilayah. Untuk menghitung data tersebut, digunakan rumus sebagai berikut,

Keterangan simbol dari rumus laju pertumbuhan ekonomi

R = Laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen.

PDB_{rt} = Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun tertentu.

PDB_{rt-1} = Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

a. PDRB per Kapita (ADHB)

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, keberadaan PDRB dapat menunjukkan peranan-peranan sektor perekonomian, yang ada sehingga identifikasi terhadap sektor yang menjadi dominan akan lebih mudah.

Dalam rentang waktu tahun 2020-2022, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan tren perkembangan yang positif dengan pertambahan nilai PDRB sebagaimana pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Musi Rawas Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB		
		2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,99	5,78	3,49
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,09	8,83	14,06
3	Industri Pengolahan	2,21	2,74	2,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,07	1,25
s	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,24	2,74	0,33
6	Konstruksi	0,60	3,68	2,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,71	0,99	4,42
8	Transportasi dan Pergudangan	1,83	0,43	3,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	0,94	1,94
10	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,32	0,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,17	1,20	2,71

12	Real Estat	1,47	0,02	2,49
13	Jasa Perusahaan	2,41	0,82	2,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,96	0,16	1,94
15	Jasa Pendidikan	2,26	0,77	2,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,66	1,69	2,74
17	Jasa Lainnya	2,52	0,85	2,02
18	Produk Domestik Regional Bruto	0,90	5,15	5,65
PDRB		30,76	39,18	57,29

Sumber : PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut BPS Tahun 2022

Pada tahun 2022, PDRB ADHB mencapai 6.1548,81 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 7.745,11 juta rupiah. Sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3.900,03 juta rupiah dan yang paling kecil yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,35 juta rupiah pada tahun 2020.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian besar didukung oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalan. Selama 3 tahun terakhir terjadi pergeseran ke lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, meskipun pergeseran struktur perekonomian masih sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 45,62%, selanjutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 24,23 dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 7,7 %.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Musi Rawas Utara sebagian besar didukung oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalan. Selama 3 tahun terakhir terjadi pergeseran ke lapangan usaha industri pengolahan dan

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, meskipun pegeseran struktur perekonomian masih sangat lamban. Sumbangan terbesar pada tahun 2022 Sektor yang menyumbang PDRB terbesar adalah Pertambangan dan Pengalihan sebesar 14,06 % selanjutnya perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 4,42% dan Transportasi dan pergudangan sebesar 3,91 %.

Sektor PDRB	[Seri 2010] Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,99	5,78	3,49
B Pertambangan dan Pengalihan	-6,09	8,83	14,06
C Industri Pengolahan	2,21	2,74	2,83
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,08	2,07	1,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Deur Ulang	2,24	2,74	0,33
F Konstruksi	0,60	3,68	2,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,71	0,99	4,42
H Transportasi dan Pergudangan	1,83	0,43	3,91
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	0,94	1,94
J Informasi dan Komunikasi	0,68	0,32	0,81
K Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,17	1,20	2,71
L Real Estate	1,47	0,02	2,49
M,N Jasa Perusahaan	2,41	0,82	2,29

Sektor PDRB	2020	2021	2022
F Konstruksi	0,60	3,68	2,34
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,71	0,99	4,42
H Transportasi dan Pergudangan	1,83	0,43	3,91
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	0,94	1,94
J Informasi dan Komunikasi	0,68	0,32	0,81
K Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,17	1,20	2,71
L Real Estate	1,47	0,02	2,49
M,N Jasa Perusahaan	2,41	0,82	2,29
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,96	0,16	1,94
P Jasa Pendidikan	2,26	0,77	2,10
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,66	1,69	2,74
R,S,T,U Jasa lainnya	2,51	0,85	2,02
Produk Domestik Regional Bruto	0,90	5,15	5,65
-			

Sumber : BPS Tahun 2022

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik pada suatu daerah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu daerah

otonomi baru berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar guna mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Secara geografis Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di jalur nasional Lintas Tengah Sumatera. Posisi yang sangat strategis tersebut tentunya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Utara sangat tergantung pada pengolahan hasil sumber daya alam khususnya hasil perkebunan yang homogen seperti sawit dan Karet.
- b. Investasi perkebunan masih sebatas bahan mentah dan hasil dari produksi sangat bergantung kepada fluktuatif harga pasar.
- c. Pandemic COVID 19 sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di sector riil. Pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan kegiatan perekonomian berjalan lambat.

Berkaitan dengan capaian terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dilaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain sebagai berikut:

- a. Bersama dengan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara melaksanakan penyusunan peraturan daerah yang mempedomani Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja guna memberikan kemudahan dan kepastian bagi investor yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.
- b. Cipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif dengan melibatkan seluruh pihak baik Polri, TNI maupun Pihak

lainnya sehingga dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

- c. Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang dapat menjadi lahan produksi baru serta memberikan pendampingan dalam pengolahan hasil perkebunan yang bersifat heterogen.
- d. Penciptaan sumber pendapatan baru yang tidak bergantung terhadap ketersediaan sumber daya alam.
- e. Mengembangkan teknologi produksi serta peningkatan pendukung infrastruktur yang mendukung proses produksi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan sebuah daerah. Indeks Gini salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Gini Ratio Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan sebuah daerah. Untuk mendapatkan nilai Indeks Gini Rasio menggunakan Rumus $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ dimana (f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i dan Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i), Indeks Gini salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

b. $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang

c. $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang

Tabel 3.4 Perbandingan Gini Ratio

Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2023

Instansi	Gini Ratio		
	2021	2022	2023
Kabupaten Musi Rawas Utara	0,280	0,290	0,296
Provinsi Sumatera Selatan	0,341	0,339	0,338
Nasional	0,382	0,385	0,384

Sumber : BPS 2024

Kabupaten/Kota 17	Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota		
	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2023 ¹⁾
Sumatera Selatan	0,341	0,339	0,338
Ogan Komering Ulu	0,347	0,347	0,321
Ogan Komering Ilir	0,299	0,293	0,322
Muara Enim	0,337	0,320	0,313
Lahat	0,298	0,335	0,325
Musi Rawas	0,277	0,328	0,284
Musi Banyuasin	0,326	0,339	0,310
Banyuasin	0,320	0,283	0,265
Ogan Komering Ulu Selatan	0,291	0,285	0,308
Ogan Komering Ulu Timur	0,299	0,327	0,296
Ogan Ilir	0,280	0,285	0,292
Empat Lawang	0,357	0,333	0,357
Pali	0,331	0,318	0,316
Musi Rawas Utara	0,280	0,287	0,296
Palembang	0,353	0,347	0,362
Prabumulih	0,382	0,370	0,373
Pagar Alam	0,328	0,293	0,313

Sumber : BPS 2024

Ratio Gini di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,296 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 0,290 dan masih berada pada tingkat ketimpangan (Ratio Gini) kategori sedang. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan Ratio Gini Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338. Terjadinya ketimpangan (Ratio Gini) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sedikitnya

lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran.

Pada tahun 2021, gini ratio sebesar 0,280 point. Dari angka tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan antar penduduk berpenghasilan tetap menengah keatas dengan penduduk berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Selain itu, potensi masyarakat yang berpenghasilan tetap dan kategori menengah keatas menjadi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan kategori menengah kebawah juga tinggi. Secara sederhana disimpulkan bahwa pendapatan penduduk di daerah ini memang rata-rata rendah (merata).

Adapun hal-hal yang mempengaruhi terhadap pencapaian indeks Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Utara, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang selalu tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dan National yaitu tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 39.500 jiwa dengan persentase 20,11 persen, tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 36.680 jiwa dengan persentase 18,45 persen dan tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 36,650 jiwa dengan persentase 18,29 persen.
2. Faktor pandemi Covid-19 telah berdampak ke semua sektor perekonomian yang menyebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi, terjadinya PHK atau dirumahkan sementara, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Berkurangnya pendapatan menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi rumah tangga. Berkurangnya pengeluaran konsumsi khususnya penduduk pada desil 2, menyebabkan penduduk yang semula adalah rentan miskin jatuh ke dalam kategori miskin.

Dalam upaya guna menurunkan tingkat ketimpangan sehingga berada pada tingkatan ideal, masih banyak terdapat kendala-kendala yang bersifat mendasar dan langsung menyentuh kepada permasalahan akar rumput, antara lain:

- a. Konektivitas dan aksestabilitas khususnya akses telekomunikasi dan transportasi belum merata dan belum menjangkau pada daerah yang jauh dari pusat keramaian

atau ibukota pemerintahan.

- b. Pemerataan sarana dan prasarana dasar yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitisasi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kehidupan social masyarakat.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang meliputi:

- a. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- f. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

b. Tujuan II :

MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Untuk pencapaian kinerja pada program ini, terdiri dari indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Infrastruktur	61,28	38,45	62,74

Indek Infrastruktur Secara umum memiliki arti fasilitas untuk kepentingan umum. Contoh dari infrastruktur adalah jalan, jalan tol, stadion, jembatan, bendungan, terminal, jaringan listrik, dan sebagainya. Untuk mendapatkan nilai Indeks Infrastruktur digunakan rumus Rata-Rata dari jumlah total persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak dan rasio elektrifikasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Beberapa misi yang menjadi kewenangan DPUPR Kabupaten Musi Rawas Utara antara lain

- a. Meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dan kearifan lokal didukung infrastruktur yang merata. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dinas teknis yang menangani infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi, air bersih dan sanitasi bersama dengan Perangkat Daerah lainnya berusaha untuk mewujudkan dan melaksanakan misi tersebut sehingga terwujud. Dengan fokus pada tujuan.
- b. Meningkatkan pemerataan dan layanan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Tabel 3.9

Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Indeks Konektivitas

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2023			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Konektivitas	Indeks	0.99	0.46	46,46

Indeks Konektivitas merupakan gambaran kekuatan interaksi antar wilayah untuk itu dalam menghitung menggunakan parameter antara lain jumlah seluruh kelurahan/desa yang sudah didapat dilalui kendaraan roda 4 berbanding dengan jumlah seluruh kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Masih ada beberapa desa yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4 dikarenakan berada diseberang sungai meskipun begitu masih bisa terkoneksi dengan jembatan gantung yang masih bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Total keseluruhan kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 7 Kelurahan dan 82 Desa dan masih ada 6 Desa yang berada di seberang sungai rupit ataupun sungai rawas yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4 antara lain Desa Embacang Lama, Desa Noman, Desa Maur Lama, Desa Batu Gajah, Desa Lesung Batu dan Desa Kertadewa. Untuk itu kedepannya kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan untuk membangun jembatan yang menyeberangi sungai yang dapat

dilalui kendaraan roda 4 agar setiap Desa bisa lebih mudah memobilisasi dan mempermudah pergerakan barang dan jasa. Jika membandingkan dengan capaian terhadap target nasional yang berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 yang telah disinergikan dengan arahan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 adalah peningkatan konektivitas jalan nasional dengan strategi yang digunakan untuk mengimplemantasikan kebijakan tersebut diantaranya melalui Program Penyelenggaraan Jalan dan mempunyai satu kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah guna peningkatan layanan dasar dan perekonomian daerah;
2. Meningkatnya ketersediaan dan layanan sarana dan prasarana umum dan sosial;

Capaian indikator kinerja dari sasaran Indeks infrastruktur terdiri dari bebepa komponen penilaian kinerja suatu kota/wilyah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Untuk mendapatkan formulasi dari indikator diatas diperlukan capaian kinerja dari rata-rata jumlah total persentase penduduk berakses air minum, persentase air limbah yang tertangani dan rasio elektrifikasi.

- a. Presentase penduduk berakses air minum

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Presentase Penduduk Berakses Air Minum

INDIKATORKINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penduduk berakses air minum	100	56,64	56,64%

Sumber : Dinas PUPR 2023

Dalam upaya memberikan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat, Pada tahun 2021 untuk kegiatan yang berkaitan dengan sistem pelayanan air minum

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Presentase Penduduk Berakses Air Minum

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase penduduk berakses air minum	100	56,64	56,64%

Sumber : Dinas PUPR

Data 56,64 % didapat dari jumlah persentase dari rumah tangga yang sudah terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dan juga SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani SPAM Jaringan Perpipaan dalam satu Kelurahan / Desa sebanyak 9.729 KK (19.12 %), Sedangkan Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani SPAM Bukan jaringan Perpipaan sebanyak 18.448 KK (36.26 %) sehingga jika ditotalkan jumlah rumah tangga yang sudah berakses air minum sebanyak 28.177 KK dari total 50.874 KK atau sebesar 55.39%.

b. Persentase air limbah yang tertangan

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Presentase Air Limbah yang Tertangani

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Air Limbah yang Tertangani	29	79,09	272,7

Sumber : Dinas PUPR

Sehubungan dengan kembalinya penanganan Air Limbah ke Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebelumnya Bidang Perumahan dan Permukiman. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Data yang ada merupakan data realisasi persentase air limbah yang tertangani sampai dengan tahun 2023. Data 77,37 % didapat dari jumlah JSP (Akses Jamban Sehat Permanen) dan jumlah JSSP (Akses Jamban Sehat Permanen). Ada terdapat

perbedaan data antara Data BPS dengan Data Aktual Terentri untuk itu data yang dipakai dalam menghitung Persentase Air Limbah yang Tertangani menggunakan data aktual yang sudah terentri. Jumlah JSP (Akses Jamban Sehat Permanen) sebanyak 32.639 (61.76 %), Sedangkan Jumlah JSSP (Akses Jamban Sehat Permanen) sebanyak 6.810 (12.89 %) sehingga jika ditotalkan akses jamban yang layak sebanyak 39.449 dari total 52.849 atau sebesar 74.64 %.

c. Rasio Elektrifikasi

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Rasio Electrifikasi

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Presentase aksesibilitas desa teraliri listrik	-	89,09	100

Sumber : Dinas PUPR

Semua Desa sudah teraliri listrik tetapi masih ada beberapa Dusun yang belum terjangkau listrik. Pada tahun 2023 memang ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan LPJU di beberapa desa dan juga kelurahan. Selain melakukan pengadaan dan pemasangan lampu jalan baru ada juga yang dilakukan pemeliharaan lampu jalan pada jalan poros yang mati sehingga pada saat malam hari tetap bisa diterangi oleh lampu jalan yang memang memerlukan penerangan sehingga dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan terjadi di jalan jika kurangnya penerangan jalan.

2. Misi II :

MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK, TOLERAN DAN HARMONI BERDASARKAN PANCASILA

a. Tujuan I :

MENINGKATKAN DAYA SAING MANUSIA MELALUI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU

Untuk mencapai kinerja pada program ini, terdiri dari indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJATAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Pembangunan Manusia	66	69,63	105,5

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk mendapatkan nilai IPM digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100 \%$$

dimana IPM_t adalah IPM suatu wilayah pada tahun t dan IPM_{t-1} adalah IPM wilayah tersebut pada tahun $t-1$. Semakin tinggi nilai Pertumbuhan IPM di suatu wilayah artinya semakin cepat pembangunan manusia di wilayah tersebut. IPM dibangun melalui Pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) yaitu kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 3.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Kabupaten Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Musi Rawas Utara	64,93	65,74	66,60
Sumatera Selatan	70,24	70,90	71,62
Nasional	71,94	72,29	72,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 66,60, ada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara dari Tahun 2022 sebesar 65,74. IPM Kabupaten Musi Rawas Utara masih berada dibawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pembangunan yang mendukung terhadap peningkatan IPM. Pergerakan perubahan IPM dari tahun ke tahun juga dinilai sebagai indikasi yang menggambarkan perubahan pembangunan.

Manusia di suatu wilayah. Ini adalah indikator untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu periode waktu. Pertumbuhan IPM tersebut perlu dikaji karena keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM pada satu waktu, akan tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM-nya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM-nya maka semakin cepat nilai IPM yang ideal akan tercapai.

Pada dasarnya dalam pembangunan manusia tidak hanya pihak pemerintah saja yang berperan. Masyarakat dituntut berpartisipasi aktif, sedangkan pihak pemerintah hanya sebagai fasilitator, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan dapat membantu meningkatkan pembangunan manusia. Dengan kesehatan yang terjamin dan pendidikan yang tinggi masyarakat dapat dengan lancar beraktivitas menggali potensi-potensi yang ada dengan bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh yang akan mendorong daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan stabil.

Adapun komponen pembentuk indeks pembangunan

manusia, antara lain sebagai berikut :

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selamahidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalanin pendidikan fomal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula.

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen Pembentuk Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota 17	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia per kabupaten/kota se Sumatera Selatan		
	2021	2022	2023
Sumatera Selatan	70,24	70,90	71,62
Ogan Komering Ulu	69,60	70,24	71,01
Ogan Komering Ilir	67,17	68,02	68,65
Muara Enim	68,86	69,43	70,24
Lahat	67,58	68,40	69,10
Musi Rawas	67,01	67,78	68,26
Musi Banyuasin	68,10	68,60	69,17
Banyuasin	67,13	67,93	68,65
Ogan Komering Ulu Selatan	65,34	65,87	66,67
Ogan Komering Ulu Timur	69,58	70,23	70,96
Ogan Ilir	67,17	67,96	68,76
Empat Lawang	65,39	66,00	66,68
Pali	64,88	65,75	66,64
Musi Rawas Utara	64,93	65,74	66,60
Palembang	78,72	79,47	80,02
Prabumulih	74,67	75,52	76,46

Sumber : BPS, 2024

Adapun hal-hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- a. Penerapan Pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi gizi yang berimbang belum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pencapaian pada komponen angka harapan hidup.
- b. Tingkat pendidikan pada masyarakat masih rendah, rata-rata lama sekolah hanya selama 6,5 tahun. Selain itu, aksestabilitas terhadap sekolah belum mampu terjangkau secara menyeluruh dan berdampak banyak kepada masyarakat.
- c. Daya beli masyarakat yang masih rendah yang sangat dekat korelasinya dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Usia produktif angkatan kerja belum terserap pada lapangan kerja yang tersedia.

Untuk senantiasa meningkatkan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan langkah- langkah strategis antara lain.

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dibidang pendidikan dan kesehatan serta akses konektivitas masyarakat.
2. Melakukan pendampingan dan stimulus bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang bisa meningkatkan daya beli dimasyarakat.
3. Melakukan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat spt Beasiswa Pendidikan, Asrama bagi Suku Anak Dalam, Pencegahan Stunting.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program yang meliputi:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- e. Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- f. Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

b. Tujuan II :

MENINGKATKAN IKLIM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AGAMIS DAN BERBUDAYA

Untuk mencapai kinerja pada program ini, terdiri dari indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang teratasi	80	85	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa, dan mogok kerja merupakan tindakan yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan memiliki peran penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mampu mendukung iklim berinvestasi yang pada gilirannya akan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu **“MEWUJUDKAN CITRA MUSI RAWAS UTARA BERHIDAYAH”**.

Upaya meredam konflik sosial dari yang ditargetkan 1 (satu) kejadian hingga mampu menggapai capaian 100%, yaitu 0 (nol) kejadian. Capaian ini tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua *stakeholder* terkait yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah –Jumlah kejadian konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dari yang ditargetkan 1 kejadian namun di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak terjadi konflik SARA yang meluas (0 kejadian) sehingga dinilai berhasil meminimalisir terjadinya konflik sosial. Capaian ini sama dengan sebesar 0 kejadian konflik sosial.

Meskipun tahun 2023 di Kabupaten Musi Rawas Utara tidak tercatat adanya kejadian konflik sosial namun hal itu tidak berarti tidak diperlukan upaya-upaya untuk meredam

meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kabupaten Musi Rawas Utara. Keberagaman yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas Utara tentunya menambah khazanah budaya namun apabila dikelola dengan baik maka bukannya tidak mungkin justru menimbulkan konflik sosial yang bisa menyebabkan kerugian material maupun *immaterial*.

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara - yaitu ormas dan lembaga nirlaba yang apabila menarik keberadaan, peran maupun fungsinya maka akan menimbulkan

Adapun hal-hal yang menjadi hambatan untuk capaian keberhasilan tersebut adalah:

1. Dinamika pertarungan politik lokal berbasis masyarakat dengan menggunakan simbol - etnisitas tertentu.
2. Menguatnya premanisme sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.
3. Pola pemukiman masyarakat yang masih terkotak - kotak berdasarkan kepentingan dan status sosial ekonomi yang dapat menghambat proses akulturasi dan asimilasi budaya.
4. Terbatasnya sarana transportasi, komunikasi dan informasi antar wilayah bagi masyarakat sehingga memudahkan terjadinya disinformasi—provokasi terhadap isu-isu tertentu yang dianggap sensitif dan memicu konflik horizontal.
5. Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat banyak (kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat).
6. Struktur kebijakan yang masih tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat
7. Pengelolaan sumberdaya alam yang eksploitatif dan tidak memberi ruang bagi masyarakat banyak.
8. Masih lemahnya kapasitas politisi lokal dalam mengelola konflik. Hal ini disebabkan masih lemahnya kapasitas sumberdaya partai dan sistem pengkaderan yang tidak menyediakan fasilitas yang cukup untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, perhatian dan keterampilan dalam kebijakan dan penanganan masalah yang dihadapi oleh

konstituennya.

9. Pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat memperlebar kesenjangan sosial antar kelompok atau komunitas akan berdampak terhadap munculnya etnisitas tertentu sebagai kelompok tertindas dan termarginalkan dalam interaksi sosial.
10. Masih lemahnya penegakan hukum menangani konflik dan masih lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam mengelola konflik.

Adapun langkah-langkah untuk capain keberhasilan tersebut adalah:

1. Fokus pada penyelesaian konflik

Langkah pertama agar konflik sosial yang terjadi bisa segera teratasi adalah Anda harus fokus pada penyelesaian konflik itu sendiri, dan jangan memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan atau siapa pihak yang paling benar di antara Anda dengan orang tersebut. Dengan fokus pada penyelesaian konflik ini, maka kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang menjadi inti permasalahan, sehingga bisa dicari penyelesaian terbaik dan masalah pun akan lebih cepat selesai.

2. Menggunakan kepala dingin

Hal utama yang harus Anda lakukan dalam mengatasi konflik ini adalah menggunakan kepala dingin, dan tidak memakai emosi. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik dengan seseorang, tetapi kita harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dalam masalah yang sedang dihadapi. Ambil napas, berjalan-jalan sebentar, dan regangkan otot sejenak supaya pikiran tenang.

3. Melakukan diskusi

Membuka percakapan atau diskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Ajak lawan bicara untuk berdiskusi dengan memiliki tempat yang netral, aman, kondusif dan juga nyaman. Sehingga bisa merundingkan masalah yang dihadapi dengan sikap yang baik. Serta bisa menjelaskan bagaimana sudut pandang dari pihak yang lawan dan dengarkan sudut pandang lawan dan Jelaskan juga bagaimana keinginan kita dalam masalah tersebut, tapi gunakan

kata-kata yang baik, sopan dan tidak berteriak. Karena jika Anda seenaknya dalam berdiskusi maka konflik akan semakin panjang dan runyam.

4. Memperjelas pokok masalah yang ada

Pada saat sedang menghadapi konflik tentu kita bisa terbawa ke masalah lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi diskusi. Jika hal itu terjadi maka kita akan merasa diserang. Maka perjelas kembali inti masalah yang ada dan hanya boleh membahas masalah itu saja, jangan membahas masalah lainnya. Dengan begitu tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar dan tidak kunjung selesai.

Adapun indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3. Misi III :

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG CERDAS, INOVATIF TRANSPARAN, RESPONSIF DAN AKUNTABEL

a. TUJUAN :

MEMPERKUAT BIROKRASI YANG BERORIENTASI KINERJA, TRANSPARAN, BERINTEGRITAS DAN BERDAYA SAING

Untuk mencapai kinerja pada program ini, terdiri dari indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Reformasi Birokrasi	65	56,26	86,55
Predikat EKPPD	3,25	2,12	65,23

Hasil evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk wujudkan Pemerintah yang Bersih dan Melayani dengan indikator kinerja masih menggunakan laporan realisasi dan capaian Kinerja pada Tahun 2023.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur negara dan merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurus segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam melakukan penilaian Reformasi Birokrasi kementerian PAN-RB mempunyai beberapa komponen yang terdiri dari :

No	Komponen Penilaian	Bobot
1.	RB General	53.77
2.	RB Tematik	2.49
3.	Total Nilai	56.26

Sepanjang tahun 2023, banyak capaian yang dilakukan Kabupaten Musi Rawas Utara terkait akuntabilitas, kelembagaan, sistem kerja aparatur sipil negara (ASN), hingga pelayanan publik. Kondisi krisis akibat Covid-19 tidak serta merta mengurangi kinerja pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 dapat tersusun dan diselesaikan sesuai dengan program yang ada di RPJMD 2021-2026.

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 menjabarkan hasil kerja pelaksanaan ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2023, yang termuat dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026 sehingga nilai Reformasi Birokrasi ada kenaikan dari 46,29 menjadi 56,26 pada tahun 2023.

Bupati Musi Rawas Utara menanggapi dengan serius dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menuju good and clean government. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan. Perkembangan dan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, hal ini terlihat dari kenaikan nilai RB dari 46,29 di Tahun 2022 menjadi 56,26 di Tahun 2023.

Perbaikan dalam pemberian layanan juga terus ditingkatkan, hal ini dapat terlihat dari capai kinerja Indikator. Tantangan dan solusi Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di area pelayanan publik adalah begitu luasnya spektrum cakupan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan struktur organisasi yang sedemikian besar. Terlebih lagi, dengan begitu kompleksnya definisi pelayanan publik yang dilayani, mencakup bukan hanya masyarakat, melainkan juga anggota dewan dan mitra kerja lembaga DPR yang jumlahnya terbilang tidak sedikit. Sebagai unsur pendukung lembaga kedewanan, ketiga pemangku kepentingan tersebut harus mampu diakomodir dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara, secara prima. Pada tataran teknis di

lapangan, mengkoordinasikan unit-unit kerja terkait dalam pengelolaan pelayanan publik dan menyatukan persepsi mengenai konsep pelayanan publik yang terstandarisasi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Walaupun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya :

1. Masih rendahnya komitmen dari pimpinan instansi baik di tingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan pecegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secaramaksimal;
3. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
4. Perapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
5. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
6. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran;
7. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.

Langkah-langkah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam mencapai nilai Reformasi Birokrasi :

1. Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Membentuk tim reformasi birokrasi
4. Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan).
5. Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
6. Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB).
8. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Oleh karenanya, upaya melakukan perubahan progresif di area pelayanan publik di dukung dengan program – program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil mempertahankan pada peringkat baik dengan indeks nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 84,07 Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendapat nilai B (62,05) sedangkan target yang ditentukan B. Indikator Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) pada tahun 2023 yang dicapai dengan nilai 2,12.

1. Predikat EKPPD

Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara tersistem akurat, sesuai dengan penilaian Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023, dinilai baik dengan predikat Tinggi (T) oleh Tim EKPPD nasional. Dari hasil validasi dan evaluasi terhadap LPPD Mitra oleh Tim Evaluasi gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), skor yang diperoleh 2,12.

Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) setiap tahun sesuai pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa LPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Upaya melakukan perubahan progresif di area pemerintahan di dukung dengan program-program sebagai berikut :

- a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- b. Program Aplikasi Informatika
- c. Program Pengelolaan Arsip
- d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- e. Program Perizinan Penggunaan Arsip
- f. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Tahun 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,34
2	Gini Rasio	0,296
3	Indeks Infrastruktur	38,45
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,63
5	Persentase Potensi Gangguan / Konflik yang teratasi	85
6	Indeks Reformasi Birokrasi	56,26
7	Predikat EKPPD	2,12

C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2023			Target s.d 2026	Capaian (%)
		Target	Realisasi	% skor		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4-4,25	4,34	102,11	4,75-5	52 %
2	Gini Rasio	0,260	0,296	113,84	0,256	91 %
3	Indeks Infrastruktur	61,28	38,45	62,27	67,34	88,8%
4	Indeks Pembangunan Manusia	66	69,63	105,5	68,00	104,7%
5	Persentase Potensi Gangguan /Konflik yang teratasi	85	85	100	95	43%
6	Indeks Reformasi Birokrasi	65	56,26	86,55	72	48 %
7	Predikat EKPPD	3,25	2,12	65,23	3,42	81%

E. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di kaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah di capai Jumlah rencana pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam perubahan anggaran Tahun 2022 dan menjadi penyusunan perhitungan anggaran ini adalah

sebesar sebagai berikut :

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Laporan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.344.045.540.718,00	1.275.954.365.285,00	94,93
Belanja Daerah	1.503.490.533.932,00	1.381.096.146.008,00	91,86
Pembiayaan Daerah	150.490.248.014,00	150.490.248.014,00	100
a. Penerimaan Pembiayaan	160.490.248.014,00	160.490.248.014,00	100
b. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	160.490.248.014,00	160.490.248.014,00	100

Sumber : BPKAD Kab. Musi Rawas Utara Tahun 2024 (Data Sebelum Audit BPK-RI)

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp. 1.503.490.533.932,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.381.096.146.008,- (91,86 %).

Tabel 3.12 Capaian Akuntabilitas Keuangan 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan	264,845,583,418	222,256,306,070	83.92
2	Dinas Kesehatan	152,869,071,803	124,038,483,252	81.14
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	535,982,820,861	526,835,571,445	98.29
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	19,677,396,779	18,858,752,781	95.84
5	Satpol PP	6,635,488,457	5,605,052,592	84.47
6	BPBD	3,428,309,651	3,240,003,587	94.51
7	Dinas Sosial	14,384,732,231	9,931,889,023	69.04

8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	3,225,782,100	3,062,552,740	94.94
9	Dinas PMD P3A	158,687,350,727	157,479,286,873	99.24
10	Dinas Ketahanan Pangan	3,120,420,091	3,018,065,104	96.72
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	11,963,672,786	10,147,776,290	84.82
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,509,834,452	3,201,556,588	91.22
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,780,215,305	7,100,210,004	91.26
14	Dinas Perhubungan	23,115,812,947	22,701,607,116	98.21
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,418,515,000	5,784,144,880	90.12
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	8,460,434,734	7,810,964,773	92.32
17	Dinas Penanaman Modal PTSP	3,856,475,275	3,147,526,158	81.62
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	7,614,296,719	7,247,875,805	95.19
19	Dinas Kebudayaan Pariwisata	5,358,301,521	4,744,581,088	88.55
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,888,867,684	6,099,093,249	77.31
21	Dinas Pertanian dan Perikanan	12,379,824,748	9,816,848,354	79.30
22	Sekretariat Daerah	72,745,361,440	66,138,386,037	90.92
23	Sekretariat DPRD	49,878,417,177	43,402,880,336	87.02
24	BAPPEDA	10,247,100,000	8,911,904,274	86.97
25	BPKAD	38,145,153,642	22,492,956,241	58.97
26	Bapenda	7,574,850,000	6,671,927,622	88.08

27	BKPSDM	7,094,080,000	5,098,607,573	71.87
28	Inspektorat	9,540,775,616	9,165,528,924	96.07
29	Badan Kesbangol	22,982,361,316	22,099,696,908	96.16
30	Kec. Rupit	3,587,093,796	3,452,164,444	96.24
31	Kec. Ulu Rawas	3,428,593,781	3,193,812,237	93.15
32	Kec. Karang Jaya	3,560,940,213	3,517,764,734	98.79
33	Kec. Karang Dapo	2,925,762,387	2,776,582,937	94.90
34	Kec. Rawas Ilir	3,272,743,916	3,235,204,802	98.85
35	Kec. Rawas Ulu	3,914,943,149	3,782,545,510	96.62
36	Kec. Nibung	3,389,150,110	3,222,235,803	95.08
TOTAL		1,503,490,533,832	1,369,290,346,154	91.07

ANALISI EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini berdasarkan capaian kinerja dan besaran sisa anggaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Efisiensi anggaran di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, didorong oleh kebijakan untuk mengalokasikan anggaran dengan kebijakan belanja berbasis program serta pemberian apresiasi terhadap upaya efisiensi pada penilaian kinerja kegiatan instansi.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018. Ada 13 sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian misi Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut memang masih.

Ditemukan beberapa kendala sehingga target yang ditetapkan belum mampu tercapai secara optimal. Beberapa hal menjadi factor yang sangat mempengaruhi terhadap capaian terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk tahun 2021 yang juga dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. SARAN

Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki. Dan untuk menyempurnakan Laporan Kinerja di tahun-tahun selanjutnya, kami mohon masukan serta saran dari evaluator maupun stakeholder yang berhubungan dengan kami. Semoga kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara semakin meningkat dikemudian hari.